

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Syakir Media Press RajaGrafindo Persada, 2021
- Anggapurana, Ida Bagus dan Pidada dkk. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widada Bhakti Persada, 2022.
- Apeldoorn, van. L. J. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1954
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartanti, Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram Press, 2020.
- Mulyadi Lilik. *Perbaikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.

- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Nyoman Tio, Gradios. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1981
- _____. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.
- Subekti, R. Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan Penjelasan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Thamrun, John. *Perselisihan Prayudisial*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1959.
- Wijayanto & Ridwan Zhucrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Jurnal

Abdolkarim Shaheydar, Administrative corruption in Iran's legal system and ways of its correction, Journal Of Current Research in Science (Morteza Navaseri, 2016).

Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, Tuntas Penerapan *Prejudiciel Geschil* dalam Perkara Pidana, Pleno Jure, (Makassar: 118 2022).

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Banyumedia Publishing, (Malang: 4 2003).

Ahmad Khoirul Umam, Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia, Pustaka belajar, (Yogyakarta : 2014).

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Yogyakarta: FH UII Press, (Yogyakarta 2004).

Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, (NTB: 2021).

Kornelius Benuf, & Muhammad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, 7, no. 1, (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

L kukug Kharisma, Karlina Apriani, Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Volume 1, Mataram University Press, (NTB 2019).

Shinta Agustina, Implementas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang : 2015)

Tesis

Bob Sulistian. 2019. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudicial Geschil. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Tesis)

Willa Junita Harahap. 2023. Penyelesaian Prejudicieel Geschil yang Timbul Antara Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) (Studi Putusan Perdata Nomor 1075/PDT.G/2019/PN SBY dan Putusan Pidana Nomor 2482/PID.B/2020/PN SBY). (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Tesis)

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG);

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Hutang

PP No 71 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Asas Prejudiciel
Geschil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Asas Prejudiciel
Geschil